

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE AUDIT

Riyantini Amalia Paramitha  
Shiddiq Nur Rahardjo<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the factors influencing the audit committee quality. The analysis used independent variable of board of commissioner characteristics, the existence of a big four auditor, managerial ownership, company size, and the company's leverage. The dependent variable is audit committee quality. The sample used is secondary data from the Indonesia Stock Exchange (IDX) is a company's annual report in 2011. Samples were taken at random from the 356 non-financial companies. Seventy-eight non-financial companies designated as the calculation formula Babbie. Variable characteristics of the board of commissioners, the presence of big four accounting firm, managerial ownership, firm size and leverage were analyzed using multiple linear regression, with hypothesis testing of *t* statistic and *F* statistic. The results of this research indicate that leverage is significantly positive influence the quality of the audit committee. While the characteristics of the board of commissioners, the presence of big four accounting firm, managerial ownership and firm size does not have a significant influence on the quality of the audit committee.*

*Keyword: agency theory, audit committees, good corporate governance, board of commissioner*

### PENDAHULUAN

Saat ini komite audit telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Bahkan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan telah diatur secara legal hampir di seluruh negara. Peraturan mengenai keberadaan komite audit diterapkan sebagai respon atas kasus kebangkrutan yang melanda perusahaan karena ketidakefektifan mereka dalam menerapkan tata kelola organisasi perusahaan yang baik. Salah satu contohnya, dijelaskan oleh Solomon (dalam Baxter, 2010) bahwa kasus yang melanda *Enron* dilatarbelakangi oleh lemahnya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang, yakni terdapat konflik kepentingan diantara manajer yang mengakibatkan komite audit gagal untuk menjalankan fungsinya dalam hal pengendalian internal dan mengontrol audit eksternal.

Keberadaan komite audit merupakan komponen yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia, keberadaan komite audit dipertegas dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 tentang *Pembentukan Komite Audit bagi BUMN*, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit* dan Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*, serta Surat Edaran BAPEPAM Nomor 03 Tahun 2002 (untuk perusahaan terbuka).

Di Indonesia, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris. Sehingga, baik buruknya kinerja atau kualitas komite audit mungkin juga dipengaruhi oleh karakteristik dewan komisaris. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mengemukakan bahwa komite audit memiliki tujuan untuk membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh atas berjalannya aktivitas perusahaan. Semakin baik karakteristik yang dimiliki oleh dewan komisaris, mengindikasikan semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki komite audit.

Keberadaan auditor eksternal juga diprediksi dapat mempengaruhi kualitas komite audit. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* biasanya telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Alasannya, KAP *Big Four* merupakan auditor eksternal yang memiliki reputasi baik

---

<sup>1</sup> Corresponding author

dimata para kliennya. Untuk itu, potensi terjadinya kecurangan dalam proses audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* semakin rendah. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap perilaku perusahaan klien. Mereka akan terdorong untuk melaksanakan pelaporan keuangan secara transparan, sesuai dengan karakteristik tata kelola perusahaan yang baik.

Kepemilikan manajerial juga berpotensi mempengaruhi kualitas komite audit suatu perusahaan. Jensen and Meckling (1976) menegaskan bahwa kenaikan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer pemilik saham dengan pemilik saham lainnya. Teori agensi memprediksi bahwa dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka akan menurunkan permintaan monitoring oleh komite audit (Beasley and Salterio, 2001).

Ukuran perusahaan juga berpotensi mempengaruhi kualitas komite audit. Menurut Fama-Jensen (dalam Anisa, 2012) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menimbulkan *agency-cost* yang semakin tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan dalam hal monitoring. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kualitas komite audit yang ada di dalamnya, mengingat komite audit merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lain (*good corporate governance*).

Tingkat *leverage* perusahaan juga diprediksi dapat mempengaruhi kualitas komite audit. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, menggambarkan semakin tinggi pembiayaan yang berasal dari utang. Keadaan seperti ini akan dapat menurunkan kepercayaan *stakeholders*, karena manajer dari perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan *stakeholders*, perusahaan perlu membentuk suatu badan independen yang dapat menjamin bahwa proses monitoring dalam perusahaan telah berjalan dengan baik (Baxter, 2010).

Kualitas komite audit sendiri dapat diprosikan dengan karakteristik komite audit yang meliputi independensi, kompetensi akuntansi/keuangan, aktivitas komite audit dan ukuran komite audit. Keempat indikator tersebut dapat mewakili komponen-komponen yang berada dalam komite audit guna menggambarkan kualitas yang dimiliki oleh suatu komite audit perusahaan. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Kompetensi akuntansi dan keuangan berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman tentang tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Aktivitas komite audit berhubungan dengan frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun. Sedangkan ukuran komite audit, diukur melalui jumlah anggota komite audit.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah beberapa indikator kualitas komite audit berhubungan dengan sejumlah faktor seperti karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*. Hal ini perlu dilakukan, mengingat penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit di Indonesia masih sangat terbatas.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori agensi merupakan teori yang mendasari praktik dunia bisnis. Teori ini menjelaskan hubungan kerja antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberi wewenang sedangkan agen merupakan pihak yang menerima wewenang dalam bentuk sebuah kontrak kerjasama. Dalam teori ini dijelaskan bahwa baik prinsipal maupun agen, masing-masing memiliki motif pribadi. Prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen. Bagaimanapun juga agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan atau harapan prinsipal, karena pada dasarnya dalam pola hubungan kedua pihak tersebut terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan. Prinsipal mengharapkan return yang maksimal, sementara agen juga memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut *agency problem*. *Agency problem* ini terjadi karena adanya distribusi informasi yang tidak seimbang yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesulitan prinsipal dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh agen. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan permasalahan tersebut, antara lain :

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.

2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Hendriksen (2000) menyatakan bahwa penelitian terakhir dalam bidang teori keagenan memfokuskan pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak, dan ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut misalnya, prinsipal mungkin tidak mengetahui preferensi manajer, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan perhitungan. Atas dasar situasi tersebut, maka diperlukan adanya pihak ketiga (auditor) yang berperan melindungi kepentingan prinsipal dengan cara melakukan kontrol terhadap kinerja agen yang telah diberi wewenang oleh prinsipal.

Dalam pelaksanaan *good corporate governance*, komite audit merupakan bagian dari mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan eksternal perusahaan. Melalui tugas-tugas dan wewenang yang dimilikinya, komite audit dapat melakukan monitoring pelaporan yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen sebagai pengguna internal tentunya mengetahui lebih banyak tentang keadaan perusahaan dibanding pengguna prinsipal. Situasi ini memicu terjadinya asimetri informasi, dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajemen dengan prinsipal. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengatasi munculnya asimetri informasi tersebut. Ketika asimetri informasi berkurang, maka *agency cost* yang ditanggung prinsipal pun akan berkurang.

#### **Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karakteristik dewan komisaris diprosikan dengan independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran dewan komisaris tersebut. Karakteristik dewan komisaris ini diprediksi dapat berpengaruh terhadap kualitas komite audit mengingat di Indonesia, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris. Jadi, ketika badan yang membentuk komite audit tersebut berkualitas, maka komite audit yang dibentuknya juga akan berkualitas. Beberapa penelitian terdahulu mendukung pendapat tersebut. Klein (2002) menemukan bahwa independensi komite audit meningkat seiring dengan peningkatan ukuran dan independensi dewan direksi. Hasil penelitian Menon dan William (1994) menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berhubungan dengan proporsi direktur independen. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Karakteristik dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap kualitas komite audit.

#### **Pengaruh Keberadaan KAP *Big Four* terhadap Kualitas Komite Audit**

Reputasi yang dimiliki oleh auditor eksternal dapat mempengaruhi perilaku auditor tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut De Angelo (dalam Baxter, 2010) semakin besar jumlah klien yang dimiliki oleh auditor, akan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh auditor tersebut, karena mereka juga harus menjaga reputasi dan kepercayaan para kliennya. De Angelo juga menyatakan bahwa semakin kompeten seorang auditor, maka semakin besar pula kemungkinannya dalam menemukan sekaligus melaporkan kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Cohen, *et al* (2004) yang menyatakan bahwa KAP *Big Four* dipandang dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan yang lebih tinggi kepada kliennya dibandingkan dengan KAP non *Big Four* sehingga, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan terdorong untuk meningkatkan mekanisme pengawasan internalnya dan bertindak sesuai dengan praktik terbaik, yang salah satunya dapat diwujudkan dengan membentuk komite audit yang berkualitas. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Keberadaan auditor Big Four berpengaruh secara positif terhadap kualitas komite audit.

#### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Komite Audit**

Jensen dan Meckling (1976) menegaskan bahwa kenaikan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer yang memiliki saham dengan pemilik saham lainnya. Kepemilikan manajerial diprediksi dapat meningkatkan semangat manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena manajer juga berperan sebagai pemilik saham, maka

manajer akan bekerja sesuai kepentingan pemegang saham. Jadi, kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajer juga akan berkurang. Hal ini juga akan berdampak pada menurunnya asimetri informasi, karena manajer sebagai pemegang saham secara langsung turut serta dalam aktivitas operasional dan pengawasan dalam perusahaan. Sehingga dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, maka diprediksi akan menurunkan kebutuhan monitoring oleh komite audit. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap kualitas komite audit.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Komite Audit**

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kompleks pula kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar perusahaan tentu saja membutuhkan struktur kepengurusan yang lebih luas dan kompleks. Perusahaan besar juga lebih berpeluang menemui risiko kecurangan, sehingga perusahaan juga membutuhkan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal yang lebih ketat. Keadaan ini menuntut perusahaan untuk memiliki komite audit yang berkualitas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan internal perusahaan. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap kualitas komite audit.

#### **Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Komite Audit**

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Baxter, 2010) ketika perusahaan melakukan *debt financing*, maka akan berpotensi menimbulkan konflik antara *shareholders* dan *debtholders* yang meningkatkan biaya agensi. Dalam memperoleh sumber pendanaan dari utang, perusahaan biasanya membuat suatu perjanjian atau kontrak utang. Kontrak utang tersebut berguna untuk mengurangi konflik antara *shareholders* dan *debtholders*. Dalam kontrak utang biasanya perusahaan diminta menyertakan laporan keuangan yang telah di audit (Smith and Warner dikutip dari Baxter, 2010). Manajer dari perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi, semakin memiliki kecenderungan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan, sebagai cara untuk menghindari biaya pelanggaran terhadap kontrak utang yang telah disepakati. Keadaan seperti ini tentu saja dapat menurunkan kepercayaan *stakeholders*. Oleh karena itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perusahaan cenderung akan meningkatkan pengawasan dengan membentuk suatu badan yang independen yang dapat menjamin bahwa kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan *prinsip good corporate governance*. Seiring dengan meningkatnya rasio *leverage*, perusahaan diprediksi cenderung akan meningkatkan pengawasan dengan membentuk komite audit yang independen dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan guna meyakinkan *stakeholders* bahwa komite audit secara efektif telah melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan (Rainsbury *et al.*, 2008). Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H5 : *Leverage* berpengaruh secara positif terhadap kualitas komite audit.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas komite audit (AC\_QUAL) yang diproksikan dengan indikator-indikator kualitas komite audit antara lain independensi komite audit, keahlian akuntansi dan keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite audit, aktivitas, serta ukuran komite audit. Masing-masing dari keempat indikator tersebut selanjutnya diberi skor *dummy* sesuai dengan kriterianya. Independensi komite audit diketahui melalui persentase anggota komite audit yang independen terhadap keseluruhan jumlah anggota komite audit. Semakin besar persentase anggota komite audit yang independen diprediksi dapat mengarahkan komite audit untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan lebih objektif. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy* dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota komite audit bersifat independen. Sebaliknya, nilai 0 diberikan jika anggota komite audit yang bersifat independen jumlahnya lima puluh persen atau kurang, dari keseluruhan anggota (Baxter, 2010). Keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit ini diukur melalui persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki kualifikasi latar

belakang pendidikan di atas dari keseluruhan anggota komite audit. Semakin besar persentase anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi atau keuangan diharapkan diprediksi dapat meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota komite audit yang memiliki latar belakang sesuai kualifikasi di atas dan nilai 0 jika lima puluh persen atau kurang dari lima puluh persen (Baxter, 2010). Aktivitas komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang diadakan komite audit dalam kurun waktu satu tahun untuk membahas masalah terkait tugas dan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika komite audit mengadakan rapat lebih dari tiga kali dalam setahun, nilai 0 diberikan jika komite audit hanya menyelenggarakan rapat tiga kali atau kurang dari tiga kali dalam setahun (Baxter, 2010). Ukuran komite audit diukur dari jumlah anggota komite audit. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika komite audit beranggotakan lebih dari tiga orang, nilai 0 jika jumlah anggota komite audit sebanyak tiga orang atau kurang (Baxter, 2010). Sesuai dengan penelitian Baxter (2010), variabel dependen yang berupa kualitas komite audit (AC\_QUAL) dihitung dengan menjumlahkan skor yang diperoleh keempat indikator kualitas audit. Sehingga nilai yang diperoleh berkisar antara 0 hingga 4.

Karakteristik dewan komisaris diproksikan dengan independensi dewan komisaris, keahlian akuntansi dan keuangan dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. Keempat indikator tersebut selanjutnya diberi skor *dummy* sesuai dengan kriterianya. . Pengukuran independensi dewan komisaris adalah melalui persentase anggota dewan komisaris yang independen dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari tiga puluh persen anggota dewan komisaris bersifat independen. Sebaliknya, nilai 0 diberikan jika anggota dewan komisaris yang independen jumlahnya hanya tiga puluh persen atau bahkan kurang dari tiga puluh persen. Keahlian akuntansi dan keuangan dewan komisaris dinilai melalui persentase anggota yang minimal memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis (sesuai kualifikasi) dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Pengukurannya, dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis minimal jenjang S1 dan nilai 0, jika anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis jumlahnya hanya lima puluh persen atau bahkan kurang dari lima puluh persen, dari keseluruhan anggota. Aktivitas dewan komisaris diukur dari jumlah rapat yang diadakan dalam waktu satu tahun. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika dewan komisaris mengadakan rapat lebih dari tiga kali dalam setahun, nilai 0 jika dewan komisaris hanya menyelenggarakan rapat sebanyak tiga kali atau bahkan kurang dari tiga kali dalam setahun. Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota dewan komisaris. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika jumlah anggota dewan komisaris sama dengan atau lebih besar dari jumlah dewan direksi dan nilai 0 jika jumlah anggota dewan komisaris lebih kecil dari jumlah anggota dewan direksi. Variabel dewan komisaris dihitung melalui metode yang sama dengan penghitungan variabel kualitas komite audit, yakni dengan menjumlahkan skor yang diperoleh keempat indikator karakteristik dewan komisaris sehingga nilai yang diperoleh berkisar antara 0 hingga 4. Keberadaan KAP *big four* merupakan variabel *dummy*. Perusahaan yang diaudit oleh *big four* diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh auditor non *big four* diberi nilai 0. Kepemilikan manajerial diukur dengan cara menjumlahkan persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan/atau direktur dan komisaris non independen. Ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai LN ( logaritma natural) dari total aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* dihitung dengan membagi total utang dengan total aset (Baxter, 2010).

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011. Hingga akhir tahun 2011 jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI adalah

sebanyak 428 perusahaan, yang terdiri dari 72 perusahaan keuangan dan 356 perusahaan non keuangan.

Dalam penelitian ini penentuan sampel akan dilakukan melalui metode *random sampling*. Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan formula Babbie (1983, dalam Rizal, 2001):

$$n = \frac{N \cdot p \cdot q}{(N-1) \cdot \frac{B^2}{4} + p \cdot q}$$

Dimana:

n = jumlah sampel yang diinginkan

N = jumlah populasi

p = probable value = 0,5 (untuk meminimalkan risiko sampling)

q = 1-p = 0,5

B = Bound of error atau kelonggaran kesalahan diperkirakan *berinterval*

*range* tidak lebih dari 10%

$$n = \frac{356 (0,5 \cdot 0,5)}{355 \cdot 0,0025 + (0,5 \cdot 0,5)}$$

n = 78,24 = 78 perusahaan

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$AC_{k,t} = \alpha_{0t} + b_{0t} BC + b_{1t} AUDITOR + b_{2t} MGOWN + b_{3t} LNSIZE + b_{4t} LEV + \varepsilon_t$$

Dimana :

$\alpha_{0t}$  : konstanta

$AC_{k,t}$  : keseluruhan indikator kualitas komite audit (independensi, keahlian, aktivitas dan ukuran komite audit), berupa penjumlahan dari nilai variabel dummy yang digunakan sebagai pengukuran keempat indikator kualitas komite audit.

$b_{0t} BC$  : karakteristik dewan komisaris yang diukur melalui penjumlahan nilai variabel dummy dari indikator-indikator yang berupa independensi dewan komisaris, keahlian akuntansi dan keuangan dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris.

$b_{1t} AUDITOR$  : keberadaan *Big Four* (variabel *dummy* :1 untuk *Big Four* ; 0 untuk non *Big Four* )

$b_{2t} MGOWN$  : kepemilikan manajerial, diukur dari persentase ekuitas yang dimiliki oleh manajer

$b_{3t} LNSIZE$  : ukuran perusahaan, diukur dengan natural log total aset

$b_{4t} LEV$  : rasio utang terhadap total aset

$\varepsilon_t$  : eror

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011. Data tahun 2011 dipilih, karena merupakan data terbaru yang menggambarkan kondisi terkini perusahaan. Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011 adalah sebanyak 428 perusahaan yang terdiri 72 perusahaan keuangan dan 356 perusahaan non keuangan. Dari 356 perusahaan non keuangan terpilih 78 perusahaan sebagai sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N \cdot p \cdot q}{(N-1) \cdot \frac{B^2}{4} + p \cdot q}$$

Dimana:

n = jumlah sampel yang diinginkan

N = jumlah populasi

p = probable value = 0,5 (untuk meminimalkan risiko sampling)

q = 1-p = 0,5

B = Bound of error atau kelonggaran kesalahan diperkirakan *berinterval range* tidak lebih dari 10%

$$n = \frac{356 (0,5,0,5)}{356 \cdot 0,0025 + (0,5,0,5)}$$

n = 78,24 = 78 perusahaan

### Statistik Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan analisis deskriptif masing-masing variabel.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AC_QUAL	78	1,00	4,00	2,4615	,65846
BC	78	,00	4,00	2,1667	,97257
MGOWN	78	,00000	,70000	,0357844	,10130610
LNSIZE	78	23,56	32,66	28,4015	1,88359
LEV	78	,0010	,9290	,450269	,2300641
Dummy		0		1	
AUDITOR	78	44	56,4%	34	43,6%

Sumber: data diolah 2013

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas komite audit (AC\_QUAL) secara rata-rata memperoleh nilai 2,4615. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel sudah memiliki komite audit dengan kualitas yang baik. Nilai kualitas komite audit terendah adalah 1 dan kualitas komite audit tertinggi adalah 4. Karakteristik dewan komisaris (BC) secara rata-rata memperoleh nilai 2,1667, yang berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel juga sudah memiliki karakteristik yang relatif baik, yang dijelaskan melalui keempat dimensi pengukur karakteristik dewan direksi tersebut. Nilai karakteristik dewan komisaris yang terendah adalah 1, sedangkan yang tertinggi adalah 4. Auditor eksternal (AUDITOR) yang diukur dengan KAP *big four* dan non *big four* menunjukkan bahwa sebesar 43,6% perusahaan sampel diaudit oleh KAP *big four* dan sebesar 56,4% perusahaan diaudit oleh KAP non *big four*. KAP *big four* dinilai memiliki reputasi yang baik sehingga diharapkan dapat mendeteksi potensi penyimpangan dalam perusahaan secara lebih baik. Deskripsi kepemilikan saham manajer (MGOWN) menunjukkan rata-rata sebesar 0,0357844. Hal ini berarti bahwa rata-rata saham perusahaan sebesar 3,58% sahamnya dimiliki oleh manajer, baik anggota dewan direksi maupun dewan komisaris. Jumlah kepemilikan saham manajerial yang paling rendah adalah 0,00% dan kepemilikan saham manajerial tertinggi sebesar 70%. Kepemilikan saham oleh manajer menunjukkan kepentingan ganda dari manajer yaitu sebagai *agent* sekaligus sebagai *principal*. Dalam hal ini diharapkan manajer yang memiliki saham dapat mewakili kepentingan saham lainnya. Variabel ukuran perusahaan (LNSIZE) yang diukur dengan total aset dalam transformasi logaritma natural menunjukkan rata-rata sebesar 28,4015. Ukuran perusahaan (logaritma natural total aset) terendah adalah sebesar 23,56 sedangkan ukuran tertinggi adalah sebesar 32,66. Variabel *leverage* (LEV) perusahaan yang diukur dengan rasio total utang terhadap total aset menunjukkan rata-rata sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perusahaan yang memiliki struktur modal dengan aset lebih besar dibanding utangnya. Tingkat *leverage* terendah adalah sebesar 0,1% sedangkan yang tertinggi adalah sebesar 93%.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 2 menunjukkan ringkasan hasil Uji t.

**Tabel 2**  
**Ringkasan Hasil Uji t**

Variabel	T	Koefisien beta	Sig.	Kesimpulan
BC	1,688	0,185	0,096	H1 ditolak
AUDITOR	0,110	0,013	0,913	H2 ditolak
MGOWN	-1,881	-0,204	0,064	H3 ditolak
LNSIZE	0,830	0,101	0,409	H4 ditolak
LEV	2,022	0,231	0,047	H5 diterima

Sumber: Data diolah 2013

### 1. Hipotesis 1 (Ditolak)

Pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh variabel karakteristik dewan komisaris (BC) terhadap kualitas komite audit (AC\_QUAL) menunjukkan nilai t sebesar 1,688 dengan signifikansi sebesar 0,096. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa karakteristik dewan komisaris tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas komite audit. Dengan kata lain H1 ditolak. Ditolaknya hipotesis ini masih wajar, karena sesuai dengan UU No 40 tahun 2007, dewan komisaris ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan kata lain, dewan komisaris dipilih melalui suara terbanyak dan tidak menutup kemungkinan sesuai keinginan pemegang saham mayoritas. Misalnya pengangkatan dewan komisaris yang berasal dari anggota keluarga pemilik saham terbesar. Hal ini dapat membuat pemilihan anggota dewan komisaris kurang mempertimbangkan latar belakang pendidikan. Berdasarkan analisis terhadap data perusahaan sampel, tidak semua anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis. Rendahnya pengetahuan ekonomi dan bisnis anggota dewan komisaris dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menjalankan tugas monitoring, termasuk dalam menentukan kriteria dan mengukur kinerja anggota komite audit. Disamping itu, keberadaan anggota yang independen baik di dalam susunan dewan komisaris maupun komite audit belum dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa prinsip *good corporate governance* telah dilaksanakan dengan baik, mengingat pemegang saham terbesar mungkin saja akan berusaha melindungi kepentingannya dengan jalan memasukkan calon anggota independen melalui hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan yang memaknai prinsip-prinsip *good corporate governance* hanya sebagai perilaku *nice to know* dan *nice to have saja* (Utama, 2004).

### 2. Hipotesis 2 (Ditolak)

Pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh variabel auditor eksternal (AUDITOR) terhadap kualitas komite audit (AC\_QUAL) menunjukkan nilai t sebesar 0,110 dengan signifikansi sebesar 0,913. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa auditor eksternal yang digolongkan dalam KAP *big four* dan KAP non *big four* tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas komite audit, dengan kata lain H2 ditolak. Alasan tidak diterimanya hipotesis ini dapat disebabkan karena sebagian besar perusahaan sampel diaudit oleh KAP non *big four*. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan terhadap sampel, hanya 34 perusahaan atau 43,6% dari seluruh sampel yang diaudit oleh KAP *big four* sedangkan sisanya yakni 44 perusahaan diaudit oleh KAP non *big four*. Sehingga hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam membentuk komite audit tidak dipertimbangkan berdasar KAP yang digunakan. Sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris. Dewan komisaris tentunya akan tetap mengusahakan yang terbaik bagi perusahaan untuk menjaga kepercayaan *stakeholders*, salah satunya dengan membentuk komite audit yang berkualitas dan dapat diandalkan untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan kegiatan monitoring

terhadap kinerja perusahaan meskipun perusahaan tidak diaudit oleh KAP *big four*. Hal ini konsisten dengan penelitian Baxter (2010).

### 3. Hipotesis 3 (Ditolak)

Pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh kepemilikan saham manajerial (MGOWN) terhadap kualitas komite audit (AC\_QUAL) menunjukkan nilai t sebesar -1,881 dengan signifikansi sebesar 0,064. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kepemilikan saham manajerial tidak memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas komite audit, dengan kata lain H3 ditolak. Alasan tidak diterimanya hipotesis ini karena di Indonesia, kepemilikan saham oleh manajer relatif kecil dengan rata-rata kepemilikan sebesar 3,58%. Bahkan berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar perusahaan di Indonesia, sahamnya tidak dimiliki oleh manajer, baik dewan komisaris maupun dewan direksi. Karakteristik kepemilikan saham manajerial seperti di atas mengakibatkan hipotesis 3 gagal didukung sehingga penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa besarnya kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kualitas komite audit.

### 4. Hipotesis 4 (Ditolak)

Pengujian hipotesis 4 mengenai pengaruh ukuran perusahaan (LNSIZE) terhadap kualitas komite audit (AC\_QUAL) menunjukkan nilai t sebesar 0,830 dengan signifikansi sebesar 0,409. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas komite audit, dengan kata lain H4 ditolak. Hipotesis 4 memprediksi bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki komite audit yang semakin berkualitas. Semakin besar ukuran perusahaan memang menuntut perusahaan untuk memiliki sistem monitoring yang lebih baik. Akan tetapi tidak didukungnya hipotesis ini masih dapat diterima, karena pada kenyataannya masih terdapat perusahaan besar yang telah merancang sistem monitoring sedemikian rupa yang belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini mengingat bahwa sistem monitoring baik yang dijalankan oleh dewan komisaris maupun komite audit, akan berhasil jika seluruh struktur *good corporate governance* memiliki komitmen yang baik untuk mematuinya. Jadi, kembali lagi pada perilaku individual dari *struktur good corporate* tersebut. Beberapa kasus yang menimpa perusahaan besar di Indonesia merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan dengan skala yang besar belum tentu memiliki komite audit yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah kasus salah catat laporan keuangan yang terjadi pada PT. Kimia Farma Tbk. Dalam kasus tersebut, Bapepam menilai pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan (berita dapat diakses di <http://www.bumn.go.id>). Kasus semacam ini tidak seharusnya terjadi jika perusahaan memiliki badan pengawas (dewan direksi dan komite audit) yang berkualitas.

### 5. Hipotesis 5 (Diterima)

Pengujian terhadap hipotesis 5 mengenai pengaruh *leverage* (LEV) terhadap kualitas komite audit (AC\_QUAL) menunjukkan nilai t sebesar 2,022 dengan signifikansi sebesar 0,047. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel *leverage* secara positif signifikan berpengaruh terhadap kualitas komite audit, dengan kata lain H5 diterima. Sebagaimana pada pengujian variabel *leverage* (LEV), hasil pengujian menunjukkan bahwa LEV mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas komite audit. Jadi, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk membentuk komite audit yang lebih berkualitas dan handal. Menurut Smith and Warner (dalam Baxter, 2010), untuk memperoleh dana dari utang, perusahaan akan terikat oleh suatu kontrak utang. Adanya kontrak utang tersebut bertujuan untuk mengurangi konflik antara *shareholders* dan *debtholders*. Dalam kontrak utang tersebut, perusahaan biasanya diminta untuk menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit. Di sisi lain, manajer dari perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya guna menghindari adanya biaya pelanggaran terhadap kontrak utang yang telah disepakati. Keadaan seperti ini tentu saja dapat menurunkan kepercayaan *stakeholders*. Oleh karena itu untuk mengembalikan kepercayaan

mereka, perusahaan akan meningkatkan pengawasan dengan membentuk suatu badan yang independen yang dapat menjamin bahwa kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan *prinsip good corporate governance*. Sehingga seiring dengan meningkatnya rasio *leverage*, perusahaan cenderung akan meningkatkan pengawasan dengan membentuk komite audit yang independen dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan guna meyakinkan *stakeholders* terutama *debtholders* bahwa komite audit secara efektif telah melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan (Rainsbury et al., 2008).

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Sedangkan karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP big four, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas komite audit.

Dalam penyusunan penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan yakni *pertama*, penggabungan empat ukuran karakteristik komite audit dan dewan komisaris didasarkan pada variabel dummy, dimana skor yang didapat oleh kedua variabel tersebut hanya berkisar pada angka 1 hingga 4 sehingga berpotensi membentuk data yang mengelompok. *Kedua*, nilai Adjusted R<sup>2</sup> masih sangat kecil, sehingga masih perlu tambahan variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi kualitas komite audit. Saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model pengukuran kualitas komite audit yang lebih akurat, misalnya dengan analisis faktor dan menambahkan jumlah sampel penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih representatif.

## REFERENSI

- Aji, A. B. (2012). "Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Kualitas Laba dan Manajemen Laba di Bursa Efek Indonesia". Semarang: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Anisa, W. N. (2012). "Pengaruh Financial Expertise of Committee Audit Member, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi pada Perusahaan-perusahaan yang Listed (Go Public) di Bursa Efek Jakarta (BEJ)". Semarang: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Baxter, P. (2010). Factors associated with the quality of audit committees. *Pacific Accounting Review*, Vol. 22 Iss: 1 pp. 57-74.
- Dyaksa, H. P. (2012). "Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Keberadaan Risk Management Committee (Studi Empiris pada Perusahaan Finansial Non Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2009- 2010)". Semarang: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. (2000). *Teori Akunting Edisi Kelima*. Batam: Interaksara.
- Indrayati, M. R. (2010). "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi". Semarang: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.



- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm : "Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* , Vol. 3, No 4, 305-360.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2012). *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta: KNKG
- Pembayun, A. G. (2012). "Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". Semarang: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Peraturan BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Utama, M. (2004). Komite Audit, Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* , Vol 1 pp. 61-79.